

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tunawiswa didefinisikan sebagai keadaan tidak memiliki rumah.¹ Kaum tunawisma, sebagai sekelompok marginal yang teralienasi dari jalur kehidupan masyarakat, telah menumbuhkan budaya khas mereka sendiri dengan corak tipologinya. Selayang pandang mengenai tipologi tunawiswa dapat diidentifikasi melalui jenisnya seperti, jenis tunawisma terlindung merujuk pada mereka yang tinggal di tempat penampungan darurat, program rehabilitasi sosial, atau tempat perlindungan yang aman. Kemudian tunawisma tanpa tempat tinggal merujuk pada mereka yang lokasi malam utamanya adalah tempat umum atau pribadi yang tidak diperuntukkan bagi, atau biasanya digunakan sebagai, tempat tidur biasa bagi orang lain (jalan, kendaraan, atau taman). Serta individu tunawisma kronis merujuk pada individu penyandang disabilitas yang telah menjadi tunawisma secara terus-menerus selama satu tahun atau lebih.²

Tunawisma adalah masalah Hak Asasi Manusia.³ Kegagalan untuk mengatasinya merupakan pelanggaran Hak Asasi Manusia Internasional. Kriminalisasi tunawisma tidak menyelesaikan masalah. Kriminalisasi justru membuat penderitaan semakin brutal dan semakin menjauhkan orang-orang yang hidup di jalanan ke dalam kegelapan. Setiap orang berhak, baik secara individu maupun bersama-sama dengan orang lain, untuk memajukan dan memperjuangkan perlindungan dan perwujudan hak asasi manusia dan kebebasan fundamental di tingkat nasional dan internasional.⁴ Sebagai landasan manifesto keberpihakan

¹ UAB Institute for Human Rights, "What is Homelessness and Why is it an Issue?" diakses dari <https://sites.uab.edu/humanrights/>, pada 12 November 2025.

² National Alliance to End Homelessness, "Chronic Homelessness," diakses dari <https://endhomelessness.org/>, pada 12 November 2025.

³ United Nations Special Rapporteur on Adequate Housing, *Homelessness as a Human Rights Crisis*, (Geneva: Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights, 2016), hlm. 4.

⁴ Lihat Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

terhadap kaum mustadh'afin sebagai istilah untuk orang-orang lemah dan tertindas (sosial, ekonomi, politik, maupun fisik) pada konteks ini kaum tunawiswa berdasarkan Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 75', yaitu:

وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا وَاجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا وَاجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ نَصِيرًا

“Mengapa kamu tidak berperang di jalan Allah dan (membela) orang-orang yang lemah dari (kalangan) laki-laki, perempuan, dan anak-anak yang berdoa, “Wahai Tuhan kami, keluarkanlah kami dari negeri ini (Makkah) yang penduduknya zalim. Berilah kami pelindung dari sisi-Mu dan berilah kami penolong dari sisi-Mu”.⁵

Kemudian Rasulullah SAW bersabda :

“Sesungguhnya Allah menolong dan memenangkan umat ini karena orang-orang lemah mereka; karena doa, kegigihan, dan akhlak mereka.” (*ad-Durr al-Mansur*, juz 2, hal. 724).⁶

“Tidakkah kuberitahukan kalian siapakah seburuk-buruk hamba Allah? Dialah orang yang keras (kepala) dan sombong. Tidakkah kuberitahukan kalian sebaik-baik hamba Allah? Dialah orang yang lemah dan ditindas (*mustadh'af*).” (*Kanzul Ummal*, hadis ke-5944).⁷

Realitas permasalahan tunawisma, gelandangan, dan pengemis menjadi isu sosial-ekonomi yang kompleks dan persisten di berbagai wilayah, termasuk Kabupaten Garut. Keberadaan mereka seringkali menjadi indikator kegagalan pembangunan kesejahteraan sosial, yang tidak hanya menyentuh aspek kemiskinan

⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: CV Darus Sunnah, 2002), hlm. 90.

⁶ Jalaluddin al-Suyuthi, *Tafsir al-Durr al-Manthur fi al-Tafsir bi al-Ma'thur*, Juz II (Beirut: Dar al-Fikr, 1993), hlm. 724.

⁷ Al-Muttaqi al-Hindi, *Kanz al-'Ummal fi Sunan al-Aqwal wa al-Af'al*, Juz III, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1985), hlm. 188, hadis ke-5944.

dan pengangguran, tetapi juga masalah pemenuhan Hak Asasi Manusia (HAM) dasar. Di satu sisi, negara memiliki kewajiban konstitusional untuk menjamin hak hidup, pekerjaan yang layak, dan perlindungan sosial bagi setiap warga negara. Di sisi lain, fenomena ini dapat menimbulkan dampak sosial, ketertiban umum, serta citra daerah. Untuk mengatasi hal ini, Pemerintah Kabupaten Garut telah menerbitkan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 18 Tahun 2017 tentang Ketertiban, Kebersihan, dan Keindahan, yang menjadi landasan hukum bagi upaya penanganan dan pembinaan.⁸

Permasalahan tunawisma, yang diidentifikasi dalam konteks regulasi daerah sebagai gelandangan, pengemis, dan anak jalanan, merupakan cerminan nyata dari ketimpangan struktural dan krisis kesejahteraan sosial yang dihadapi oleh Kabupaten Garut. Keberadaan mereka bukan sekadar fenomena kemiskinan individual melainkan kemiskinan sistemik, dan isu hak asasi manusia (HAM) yang mendasar. Mereka merupakan kelompok rentan yang hak-hak sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya dasarnya mulai dari hak atas tempat tinggal yang layak, kesehatan, hingga pekerjaan sering terabaikan atau bahkan dilanggar dalam proses penanganan.⁹ Secara spesifik di Garut, peningkatan jumlah, terutama di pusat-pusat keramaian dan area wisata, mulai dianggap mengganggu ketertiban umum dan citra estetika daerah, yang kemudian memicu respons normatif dari pemerintah daerah.

Sebagai respons terhadap dinamika sosial ini, Pemerintah Kabupaten Garut telah mengambil langkah hukum melalui penetapan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 18 Tahun 2017 tentang Ketertiban, Kebersihan, dan Keindahan. Perda ini disusun dengan tujuan ganda yakni menertibkan dan membina kelompok gelandangan, pengemis, dan anak jalanan untuk mengurangi dampak negatif sosial dan mengintegrasikan mereka kembali ke masyarakat. Secara normatif, Perda ini merupakan manifestasi dari kewajiban konstitusional negara (sebagaimana

⁸ Pasal 1 angka 12, Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 18 Tahun 2017 tentang Ketertiban, Kebersihan, dan Keindahan.

⁹ Nur Sayyid Santosa Kristeva, *Manifesto Wacana Kiri; Membentuk Solidaritas Organik*, (Cilacap: Revdem, 2012), hlm. 44.

diamanatkan UUD 1945 Pasal 34 Ayat 1) untuk memelihara fakir miskin dan anak-anak telantar.¹⁰ Namun, inti dari penelitian ini terletak pada paradoks yang muncul apakah penertiban yang dilakukan berdasarkan Perda ini telah sepenuhnya sejalan dengan semangat pembinaan yang humanis dan penghormatan terhadap martabat serta hak-hak dasar tunawisma, ataukah justru Perda ini menjadi instrumen hukum yang melegitimasi praktik-praktik yang *dehumanizing* (merendahkan martabat) dan mengabaikan akar permasalahan struktural kemiskinan? Peninjauan ini membuka pintu khazanah bagi analisis yang lebih dalam mengenai dimensi keadilan sosial dan Hak Asasi Manusia (HAM) di tingkat lokal.

Meskipun telah ada regulasi, efektivitas pelaksanaannya dalam menjamin Hak Asasi Manusia (HAM) tunawisma perlu ditinjau ulang. Pendekatan interdisipliner terhadap penanganan gelandangan, pengemis, dan anak jalanan seringkali berfokus pada penertiban dan rehabilitasi parsial, yang rentan mengabaikan dimensi hak-hak dasar mereka dan cenderung meminggirkan nilai-nilai kemanusiaan universal. Oleh karena itu, penelitian ini menganggap penting untuk menganalisis Perda tersebut melalui kacamata teoretis yang lebih mendalam dan kritis. Kerangka berpikir ini akan menggali potensi benturan antara hukum positif daerah dengan prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia (HAM) universal, terutama dalam konteks global yang didominasi oleh narasi Hak Asasi Manusia (HAM) Barat.

Meskipun Peraturan Daerah (Perda) Nomor 18 Tahun 2017 telah menjadi kerangka hukum untuk penanganan tunawisma di Kabupaten Garut, terdapat kekhawatiran akademik dan praktis mengenai efektivitas dan legitimasi moral pelaksanaannya dalam menjamin Hak Asasi Manusia (HAM). Secara umum, pendekatan kebijakan publik terhadap kelompok rentan seringkali mengedepankan aspek ketertiban umum (penertiban) daripada aspek pemenuhan hak (pembinaan dan pemberdayaan). Praktik di lapangan, seperti razia dan penampungan paksa, rentan memunculkan isu pelanggaran Hak Asasi Manusia HAM, termasuk

¹⁰ Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 berbunyi: “Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara.”

pembatasan kebebasan bergerak, perampasan properti minimal, hingga potensi kekerasan dan trauma psikologis, yang semuanya bertentangan dengan prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia (HAM) universal.

Oleh karena itu, penelitian ini menekankan analisis kritis bahwa evaluasi Perda ini tidak bisa hanya didasarkan pada kepatuhan prosedural, melainkan harus menggunakan lensa kritis yang transformatif. Pendekatan konvensional yang cenderung menyamaratakan tunawisma sebagai masalah yang harus dibersihkan gagal menangani akar struktural dari kemiskinan dan ketidakadilan. Tinjauan ini penting karena narasi Hak Asasi Manusia (HAM) yang selama ini mendominasi di tingkat global dan nasional yang seringkali berakar pada tradisi liberal Barat, maka kemudian perlu dipertanyakan ulang relevansinya secara kontekstual. Inilah yang mendasari perlunya analisis menggunakan kerangka teoretis dekolonisasi, untuk melihat apakah regulasi lokal Peraturan Daerah (Perda) telah benar-benar menjamin martabat kemanusiaan tunawisma ataukah hanya mereplikasi pola penindasan struktural yang dilegitimasi oleh hukum positif.

Untuk memberikan perspektif yang berbeda dan interdisipliner penelitian ini menggunakan Teori Dekolonisasi HAM Abdullah Ahmed An-Na'im.¹¹ Teori ini mengkritik dominasi wacana HAM Barat dan menawarkan pendekatan inklusif yang mengakomodasi konteks budaya, agama, dan lokal, dalam hal ini melalui interpretasi hukum Islam (syariah) yang progresif untuk mendukung HAM. Pendekatan An-Na'im relevan untuk meninjau apakah Perda Garut telah benar-benar menjamin hak-hak tunawisma secara bermartabat atau justru mereproduksi struktur kekuasaan yang meminggirkan. Selanjutnya, penelitian ini juga disandingkan dengan Teori Political Thought Abu A'la Al-Maududi untuk melihat landasan ideal dan praktis dari tata kelola pemerintahan yang berbasis nilai-nilai Islam, yang menekankan pada konsep keadilan sosial dan tanggung jawab negara (ulil amri) terhadap kesejahteraan rakyatnya, khususnya yang terpinggirkan.¹²

¹¹ Abdullahi Ahmed An-Na'im, *Dekonstruksi Syari'ah: Wacana Kebebasan Sipil, Hak Asasi Manusia, dan Hubungan Internasional dalam Islam*, terj. Ahmad Suaedy dan Amiruddin al-Rahab (Yogyakarta: LKiS, 1994), hlm. 266-271.

¹² Abul A'la al-Maududi, *The Islamic Law and Constitution*, terj. Khurshid Ahmad (Lahore: Islamic

Kemudian saat menganalisis secara komprehensif Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Garut, penelitian ini mengadopsi dua kerangka teoretis utama yang saling melengkapi dan menawarkan perspektif oksidentalisme mengenai keadilan dan pemerintahan. Pertama, digunakan Teori Dekolonisasi Hak Asasi Manusia (HAM) Abdullah Ahmed An-Na'im.¹³ An-Na'im mengkritik keras hegemoni narasi HAM universal yang didominasi oleh tradisi liberal Barat (paradigma yang cenderung mengutamakan hak sipil-politik daripada hak sosial-ekonomi), yang seringkali terasa asing atau bahkan bertentangan ketika diterapkan di konteks masyarakat Muslim. An-Naim berargumen bahwa penegakan HAM yang efektif harus melalui proses transformasi budaya di tingkat akar rumput, menuntut reinterpretasi terhadap ajaran agama dan tradisi lokal, dalam hal ini Syariah, secara progresif untuk menyelaraskannya dengan standar HAM modern.¹⁴ Relevansinya untuk Kabupaten Garut ialah menyoal kembali apakah Peraturan Daerah (Perda) tersebut sebagai produk hukum lokal atau justru menjadi alat kolonisasi internal yang menindas kelompok rentan, atau telah membuka ruang untuk HAM yang kontekstual dan bermartabat.

Kemudian, perspektif An-Na'im akan disandingkan dengan Teori Political Thought Abu A'la Al-Maududi.¹⁵ Meskipun Al-Maududi dikenal dengan gagasan negara Islam yang tegas seperti konsep Teo-Demokrasi yang menempatkan kedaulatan di tangan Tuhan, pemikirannya tentang tujuan negara sangat relevan dalam konteks kesejahteraan sosial. Al-Maududi menekankan bahwa fungsi utama negara adalah menjalankan kewajiban agama untuk menegakkan keadilan sosial ('*adl*) dan menjamin kebutuhan dasar seluruh rakyat, termasuk yang paling miskin (tunawisma).¹⁶ Perspektif Al-Maududi, kegagalan negara dalam memberikan

Publications, 1960), hlm. 145.

¹³ Abdullahi Ahmed An-Na'im, *Dekonstruksi Syari'ah: Wacana Kebebasan Sipil, Hak Asasi Manusia, dan Hubungan Internasional dalam Islam*, terj. Ahmad Suaedy dan Amiruddin al-Rahab (Yogyakarta: LKiS, 1994), hlm. 266-271.

¹⁴ *Ibid.*, hlm. 276.

¹⁵ Abul A'la al-Maududi, *The Islamic Law and Constitution*, terj. Khurshid Ahmad (Lahore: Islamic Publications, 1960), hlm. 145.

¹⁶ *Ibid.*, hlm. 105.

perlindungan dan kesejahteraan sosial kepada warganya, terutama kelompok rentan, sebagai manifestasi kegagalan dalam menjalankan amanah keagamaan (ulil amri). Penggunaan teori ini berfungsi untuk menguji landasan moral dan etis dari Peraturan Daerah (Perda) Garut, memastikan bahwa penanganan tunawisma tidak hanya bersifat *top-down* dan legalistik, tetapi juga berakar pada tanggung jawab negara yang mendalam terhadap pemenuhan hak-hak sosial-ekonomi warganya.

Kemudian posisi dan fungsi unifikasi teori-teori perspektif Abdullah Ahmed An-Na'im dan Abu A'la Al-Maududi dalam penelitian ini dirancang untuk menciptakan suatu analisis kritis dan progresif yang komprehensif serta ragam dimensi. Sinergi ini bertujuan mengatasi keterbatasan jika hanya menggunakan salah satu teori saja. An-Na'im memberikan lensa metode dekolonisasi dan kritik terhadap bentuk HAM, menantang asumsi universalitas Hak Asasi Manusia (HAM) Barat dan menuntut kontekstualisasi berbasis budaya yang progresif. Fokusnya adalah pada bagaimana Hak Asasi Manusia (HAM) dapat diinternalisasi dan dijustifikasi secara otentik dalam konteks lokal Muslim Garut.¹⁷ Di sisi lain, Al-Maududi menyediakan kerangka filosofis dan landasan etis mengenai apa tanggung jawab Negara pada konteks ini pemerintah daerah Kabupaten Garut terhadap kesejahteraan rakyatnya, terutama kaum *mustadh'afin* (yang lemah atau tertindas), pada konteks ini kaum tunawisma berdasarkan prinsip-prinsip Islam tentang keadilan sosial (*'adl*) dan kewajiban kolektif.¹⁸

Melalui unifikasi dua tokoh pemikir ini, penelitian ini berupaya menjawab pertanyaan inti apakah Perda Garut No. 18 Tahun 2017, dan implementasinya, telah memenuhi standar Hak Asasi Manusia (HAM) yang didekolonisasi perspektif An-Na'im dan standar Tanggung Jawab Negara Islam terhadap kemakmuran sosial perspektif Al-Maududi. An-Na'im menuntut Peraturan Daerah (Perda) tersebut menjamin martabat dan hak-hak tunawisma tanpa mengorbankan konteks lokal,

¹⁷ Abdullahi Ahmed An-Na'im, *Dekonstruksi Syari'ah: Wacana Kebebasan Sipil, Hak Asasi Manusia, dan Hubungan Internasional dalam Islam*, terj. Ahmad Suaedy dan Amiruddin al-Rahab (Yogyakarta: LKiS, 1994), hlm. 266-271.

¹⁸ Abul A'la al-Maududi, *The Islamic Law and Constitution*, terj. Khurshid Ahmad (Lahore: Islamic Publications, 1960), hlm. 145.

sementara Al-Maududi menuntut pemerintah bertindak sebagai pelayan yang adil, memastikan bahwa praktik penertiban dan pembinaan tidak melanggengkan ketidakadilan sosial, melainkan berfungsi sebagai instrumen pemenuhan hak yang berakar pada nilai-nilai ketuhanan (Teo-sentrisme) dan kemanusiaan (Antroposentrisme).¹⁹ Menjadikan suatu kerangka refleksi serta referensi untuk evaluasi yang tidak hanya mengkritik dari sudut pandang hukum positif, tetapi juga memberikan rekomendasi kebijakan yang lebih humanis, kontekstual, dan memiliki landasan moralitas yang kuat.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penelitian ini memandang bahwa analisis kritis terhadap Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Garut Nomor 18 Tahun 2017 tentang Ketertiban, Kebersihan, Dan Keindahan menjadi suatu keniscayaan akademis dan kebutuhan sosial. Aksentuasi analisis ini tidak semata-mata pada validitas formal hukum, tetapi pada dampak substantif dan moral Perda tersebut terhadap kelompok tunawisma di Kabupaten Garut. Penelitian ini akan secara khusus mengkaji implementasi praktis penertiban dan pembinaan yang diatur dalam Peraturan Daerah (Perda) telah benar-benar mencerminkan jaminan martabat manusia dan keadilan sosial, atau sebaliknya, hanya menjadi alat birokrasi yang memarjinalkan, ketika ditinjau menggunakan dua pilar teoretis yang terdiri dari Dekolonisasi Hak Asasi Manusia (HAM) An-Na'im yang menuntut penghormatan Hak Asasi Manusia (HAM) yang autentik dan kontekstual, serta Pemikiran Politik Thought Al-Maududi yang menuntut pertanggungjawaban negara secara etis dan agama dalam menjamin kesejahteraan rakyat miskin.

Analisis ini diharapkan dapat menciptakan pembaharuan yang tidak hanya mengkritisi potensi inkonsistensi antara hukum lokal dan prinsip Hak Asasi Manusia (HAM) universal, tetapi juga memberikan rekomendasi konstruktif bagi Pemerintah Kabupaten Garut. Rekomendasi ini ditujukan untuk merumuskan kebijakan penanganan tunawisma yang lebih komprehensif, humanis, dan berkeadilan sosial, sehingga mampu mengakhiri siklus pamarjinalan dan benar-

¹⁹ Hassan Hanafi, *Studi Filsafat 2: Pembacaan atas Tradisi Barat Modern*, (Yogyakarta: LKiS Pelangi Aksara, 2015), hlm. 102.

benar menjamin hak-hak dasar warga negara yang paling rentan. Jelaslah dengan demikian penulis akan menyoal dan meninjau kembali implementasi praktis Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Garut Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Ketertiban, Kebersihan, dan Keindahan berdasarkan dialog Perspektif Abdullahi Ahmed An-Naim dan Abu A'la Al-Maududi.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, penulis menunjukan dalam, Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 18 Tahun 2017 tentang Ketertiban, Kebersihan, dan Keindahan maka dapat dirumuskan beberapa inti dari permasalahan yang menjadi pokok pembahasan dalam penelitian ini, yaitu:

- 1 Bagaimana konsep teori dekolonisasi hak asasi manusia Abdullahi Ahmed An-Naim dan teori political thought Abu A'la Al-Maududi?
- 2 Bagaimana implementasi penanganan dan pembinaan tunawisma di Kabupaten Garut?
- 3 Bagaimana relevansi konsep teori dekolonisasi hak asasi manusia Abdullah Ahmed An-Naim dan teori political thought Abu A'la Al-Maududi serta implikasinya terhadap penanganan tunawisma di Kabupaten Garut?

C. Tujuan Penelitian

Berkenaan dengan rumusan masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka tujuan yang ingin dicapai dalam pelaksanaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui konsep teori Dekolonisasi Hak Asasi Manusia Abdullahi Ahmed An-Na'im dan teori Political Thought Abu A'la Al-Maududi.
2. Untuk mengetahui implementasi penanganan dan pembinaan tunawisma di Kabupaten Garut.
3. Untuk mengetahui relevansi konsep teori Dekolonisasi Hak Asasi Manusia Abudullahi Ahmed An-Na'im dan teori Political thought Abu A'la Al-Maududi serta implikasinya terhadap penanganan dan pembinaan tunawiswa di Kabupaten Garut.

D. Manfaat Penelitian

Secara Teoritis penelitian ini berkontribusi pada pengembangan literatur akademik bidang hukum positif dan hukum Islam dengan mengintegrasikan dua perspektif, yaitu Teori Dekolonisasi Hak Asasi Manusia Abdullahi Ahmed An-Na'im dan teori Political Thought Abu A'la Al-Maududi. Hal ini memberikan corak analisis kritis, progresif dan interdisipliner baru terhadap isu strategis dan kebijakan publik lokal. Serta Memperkaya khazanah penelitian yang mengkaji persimpangan antara hukum positif (Perda), filsafat politik Islam, dan isu kesejahteraan sosial, khususnya dalam konteks perlindungan hak-hak kaum mustadh'afin. Sehingga dapat dijadikan bahan bacaan, referensi dan acuan bagi peneliti-peneliti berikutnya.

Secara Praktis untuk Pemerintah Kabupaten Garut hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi dan pokok-pokok rekomendasi yang konstruktif bagi Pemerintah Kabupaten Garut, khususnya Dinas Sosial dan instansi terkait, dalam meninjau ulang dan menyempurnakan implementasi praktis Perda Nomor 18 Tahun 2017 agar lebih humanis, efektif, dan berbasis Hak Asasi Manusia (HAM) yang berkeadilan sosial. Dan untuk aktivis sosial pegiat Hak Asasi Manusia (HAM) Penelitian ini diharapkan dapat menjadi instrumen advokasi dan referensi bagi aktivis sosial, lembaga swadaya masyarakat (LSM), dan organisasi keagamaan dalam memperjuangkan hak-hak tunawisma, dengan memberikan landasan teoretis yang kuat berdasarkan nilai-nilai dekolonisasi HAM dan tanggung jawab sosial negara. Kemudian Memberikan kerangka acuan dan referensi bagi peneliti berikutnya yang tertarik untuk mengkaji isu kesejahteraan sosial, kebijakan publik, atau hukum daerah dengan menggunakan perspektif kritis dan progresif yang melibatkan perpaduan teori Hak Asasi Manusia Islam atau pemikiran politik kontemporer.

E. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran ini menjelaskan bahwa penelitian berawal dari fenomena tunawisma yang ditangani melalui Peraturan Daerah Perda Kabupaten Garut Nomor 18 tahun 2017 Tentang Ketertiban, Kebersihan, dan Keindahan yang cenderung represif. Masalah tersebut dianalisis menggunakan dua teori terdiri dari Dekolonisasi Hak Asasi Manusia HAM oleh Abdullahi Ahemd An-Na'im dan political thought Abu A'la Al-Maududi. Kedua teori tersebut digunakan untuk analisis kritis dan mengevaluasi apakah kebijakan daerah sudah sesuai prinsip perlindungan martabat manusia dan keadilan sosial. Hasilnya berupa rekomendasi kebijakan yang lebih humanis, kontekstual, dan berorientasi kesejahteraan.

Fenomena tunawisma di Kabupaten Garut bukan hanya berkaitan dengan keberadaan individu-individu di ruang publik, tetapi merupakan dampak dari berbagai faktor sosial, ekonomi, dan keluarga. Para tunawisma umumnya mengalami seperti kerentanan sosial, tunawisma mengalami penelantaran, kekerasan, atau putus relasi keluarga. Kemudian kurangnya akses layanan sosial, minimnya fasilitas rehabilitasi dan program pemberdayaan menyebabkan mereka kembali ke jalan. Serta keterbatasan ekonomi, mereka kehilangan kemampuan memenuhi kebutuhan dasar seperti tempat tinggal, makanan, dan kesehatan. Fenomena ini memunculkan persepsi negatif masyarakat, khususnya terkait ketertiban Kabupaten-Kota. Oleh karena itu pemerintah merespons dengan kebijakan penertiban melalui Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Garut Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Ketertiban, Kebersihan, dan Keindahan.²⁰ Namun, masalah tunawisma sejatinya ialah problem kemanusiaan, bukan sekadar pelanggaran ketertiban umum.

Peraturan Daerah (Perda) No. 18 Tahun 2017 tentang Ketertiban, Kebersihan, dan Keindahan (K3) didesain untuk menjaga lingkungan Kabupaten

²⁰ Kabupaten Garut, *Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Ketertiban, Kebersihan, dan Keindahan*, Pasal 1 angka 15

Garut agar tertib, bersih, dan indah.²¹ Dalam konteks tunawisma, Peraturan Daerah (Perda) ini mengatur tentang larangan aktivitas mengganggu kenyamanan publik, seperti mengamen, mengemis, atau tidur di fasilitas umum. Kemudian Kewenangan Satpol PP untuk melakukan penertiban, penggarukan, dan pengamanan tunawisma. Serta pengaturan sanksi administratif atau tindakan lain untuk memindahkan tunawisma dari ruang publik.²² Namun, Peraturan Daerah Perda ini memiliki beberapa karakteristik kebijakan yang perlu dikritis diantaranya seperti fokus pada penertiban represif bukan pembinaan rehabilitatif. Kemudian tidak memberikan peta program penanganan tunawisma secara komprehensif dan tidak mencantumkan kewajiban pemda dalam menyediakan layanan sosial. Sehingga implementasinya cenderung bersifat jangka pendek dan tidak menyelesaikan akar masalah.

1. Teori Dekolonisasi Hak Asasi Manusia (HAM)

Teori Dekolonisasi Hak Asasi Manusia (HAM) menurut Abdullahi Ahmed An-Naim adalah proses memahami dan menerapkan hak asasi manusia (HAM) dalam konteks lokal dan budaya masyarakat, serta meninjau kembali model hukum Islam historis agar sesuai dengan konstitusionalisme dan HAM universal.²³ Ini berarti tidak menerapkan HAM hanya berdasarkan model Barat, tetapi juga melihat relevansinya dengan tradisi dan nilai-nilai lokal, seperti yang ditunjukkan melalui kritik terhadap negara Islam historis.

Teori Dekolonisasi Hak Asasi Manusia HAM perspektif Abdullahi Ahmed An-Na'im berorientasi sebagai diantaranya:

a. Hak Asasi Manusia (HAM) sebagai proses sosial non-Barat.

Menurut An-Na'im, Hak Asasi Manusia HAM bukan milik Barat tetapi milik semua manusia. Kebijakan publik tidak boleh mendominasi atau

²¹ *Ibid.*, Pasal Pasal 1 angka 12.

²² *Ibid.*

²³ Abdullahi Ahmed An-Na'im, *Dekonstruksi Syari'ah: Wacana Kebebasan Sipil, Hak Asasi Manusia, dan Hubungan Internasional dalam Islam*, terj. Ahmad Suaedy dan Amiruddin al-Rahab (Yogyakarta: LKiS, 1994), hlm. 266-271.

memarginalkan kelompok rentan, seperti tunawisma.²⁴ Relevan dengan firman Allah SWT dalam surat Al-Hujurat ayat 13, yaitu:

إِنَّا كَرَّمَكُم مَّا أَتَيْنَا النَّاسَ إِنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاهُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا
إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ۖ عِنْدَ اللَّهِ أَتُّقُونَ

"Wahai manusia! Sungguh, Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sungguh, yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa".²⁵

b. Dekolonisasi praktik kebijakan

Dekolonisasi menurut Abdullahi Ahmed An-Na'im berarti menghapus cara-cara yang bersifat refresif, dominatif, dan sebagai cipta kondisi alat untuk mengontrol kelompok marginal.²⁶ Penertiban tunawisma tanpa solusi dianggap melanjutkan pola kolonial modern. dengan konsep humanisme sesuai dengan firman Allah SWT dalam surat At-Tiin ayat 4, yaitu:

وَمَا أَحْسَنَ تَقْوِيمٍ لِّقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي

"Sungguh, Kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya".²⁷

c. Internalization of Human Rights

Hak Asasi Manusia (HAM) harus selaras dengan budaya dan nilai lokalitasnya. Kebijakan penertiban yang mengabaikan konteks lokal serta martabat tunawisma melanggar prinsip ini. Sesuai dengan konsep kaidah fikih yaitu **الْعَادَةُ**

²⁴ *Ibid.*

²⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: CV Darus Sunnah, 2002), hlm. 517.

²⁶ Abdullahi Ahmed An-Na'im, *Dekonstruksi Syari'ah: Wacana Kebebasan Sipil, Hak Asasi Manusia, dan Hubungan Internasional dalam Islam*, terj. Ahmad Suaedy dan Amiruddin al-Rahab (Yogyakarta: LKiS, 1994), hlm. 276-281.

²⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: CV Darus Sunnah, 2002), hlm. 597.

مَحْكَمَةٌ. *al-'Adah al-Muhakkamah* yang menyatakan bahwa adat atau kebiasaan umum yang berlaku di masyarakat dapat dijadikan sumber hukum.²⁸

d. Human dignity sebagai asas utama

Pemerintah wajib menjamin martabat tunawisma, misalnya melalui rumah rehabilitasi sosial, layanan sosial, pendidikan keterampilan, dan pengayaan intervensi ekonomi. Jika Perda tidak memenuhi hal ini, maka kebijakan tersebut tidak sejalan dengan paradigma Hak Asasi Manusia (HAM) perspektif Abdullahi Ahmed An-Na'im.²⁹ Pentingnya hak hidup dalam pandangan Imam Ali as dapat dilihat dari surat perintah beliau kepada Malik Ashtar yang berbunyi, "Hindarilah pertumpahan darah yang tidak semestinya." Dalam kasus tersebut, Imam Ali as telah mengisyaratkan hal penting bahwa penguasa tidak boleh memperkuat pemerintahannya dengan cara menumpahkan darah, di mana masalah itu selalu mewarnai sejarah kehidupan manusia.³⁰

2. Teori Political Thought

Teori Political Thought perspektif pemikiran Abu A'la al-Maududi menekankan kedaulatan Tuhan sebagai landasan utama, menolak demokrasi Barat yang berdasarkan kedaulatan rakyat.³¹ Abu A'la Al-Maududi mengusulkan konsep Teodeokrasi di mana kekuasaan tertinggi berada pada Tuhan, yang berarti hukum di dunia harus didasarkan pada syariat Islam, bukan kehendak manusia. Islam dilihat sebagai sistem yang komprehensif dengan implikasi politik dan ekonomi, yang bertujuan untuk menciptakan masyarakat dan negara ideal yang disebut *khilafah 'ala minhaj al-nubuwwah* (kekhalifahan dengan pola kenabian).³²

²⁸ A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis* (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 84.

²⁹ Abdullahi Ahmed An-Na'im, *Dekonstruksi Syari'ah: Wacana Kebebasan Sipil, Hak Asasi Manusia, dan Hubungan Internasional dalam Islam*, terj. Ahmad Suaedy dan Amiruddin al-Rahab (Yogyakarta: LKiS, 1994), hlm. 271-276.

³⁰ Sayyid Radhi, *Nahjul Balaghah: Kumpulan Khutbah, Surat, dan Hikmah Imam Ali bin Abi Thalib*, terj. Muhammad al-Baqir (Bandung: Mizan, 2003), hlm. 248.

³¹ Abul A'la Al-Maududi, *The Islamic Law and Constitution* (Lahore: Islamic Publications, 1960), hlm. 212.

³² Abul A'la Al-Maududi, *Prinsip-Prinsip Dasar Islam*, terj. Abdullah Suhaili (Bandung: Pustaka,

Teori Political Thought Perspektif Abu A'la Al-Maududi berorientasi sebagai konsep corak, diantaranya:

a. Prinsip Theo-democracy

Menurut Abu A'la Al-Maududi, negara harus menjalankan roda pemerintahan berdasarkan nilai moral Islam yang menjunjung: keadilan sosial, kesejahteraan umat, dan perlindungan bagi fakir miskin.³³ Tunawisma termasuk dalam golongan mustadh'afin (golongan lemah) yang harus dipenuhi hak-haknya. Sesuai dengan firman Allah SWT dalam surat Ali Imran ayat 26, yaitu:

وَتُعْزُ مِنْ تَشَاءُ ۖ قُلِ اللَّهُمَّ مَلِكُ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ
إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۖ يُبْدِكَ الْخَيْرَ ۖ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ

"Katakanlah (Muhammad), "Wahai Tuhan pemilik kekuasaan! Engkau berikan kekuasaan kepada siapa pun yang Engkau kehendaki, dan Engkau cabut kekuasaan dari siapa pun yang Engkau kehendaki. Engkau muliakan siapa pun yang Engkau kehendaki, dan Engkau hinakan siapa pun yang Engkau kehendaki. Di tangan Engkaulah segala kebajikan. Sungguh, Engkau Mahakuasa atas segala sesuatu".³⁴

b. Kewajiban Negara dalam Kesejahteraan

Berdasarkan pemikiran Al-Maududi Negara berkewajiban menjamin kebutuhan dasar warganya dan kelompok miskin tidak boleh diperlakukan sebagai beban.³⁵ Serta individu yang tidak mampu harus diberi kesempatan untuk membangun dirinya. Penertiban tanpa pembinaan bertentangan dengan prinsip keadilan sosial Islam. Sesuai dengan firman Allah dalam surat Al-Maidah ayat 8, yaitu:

1984), hlm. 92.

³³ *Ibid.*, hlm. 123.

³⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: CV Darus Sunnah, 2002), hlm. 53.

³⁵ Abul A'la Al-Maududi, *Hukum dan Konstitusi Sistem Politik Islam*, terj. Asep Hikmat (Bandung: Mizan, 1995), hlm. 156

يٰٓاُولَآءِ لَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلٰٓى اِيْهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُوْنُوْا قَوَّٰمِيْنَ لِلّٰهِ شُهَدَآءَ بِالْقِسْطِ

بِمَا تَعْمَلُوْنَ ۗ اِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌ ۙ وَاتَّقُوا اللّٰهَ ۚ هُوَ اَقْرَبُ لِلتَّقْوٰى ۖ اِعْدِلُوْا ۚ اَلَا تَعْدِلُوْا

"Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap suatu kaum, mendorongmu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan".³⁶

c. *Amar Ma'ruf Nahi Munkar* dalam kebijakan sosial

Melarang aktivitas negatif tidak cukup negara harus menciptakan kondisi positif melalui program pemberdayaan dan penyelamatan tunawisma.³⁷ Konsep *Amar Ma'ruf Nahi Munkar* sesuai dengan firman Allah SWT yaitu berdasarkan surat Al-Imran ayat 110:

وَلَوْ ۙ كُنْتُمْ حَيْرَ اُمَّةٍ اُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ

مِنْهُمْ الْمُؤْمِنُوْنَ وَاَكْثَرُهُمُ الْفٰسِقُوْنَ ۚ اَمَنْ اَهْلُ الْكِتٰبِ لَكَانَ خَيْرًا لّٰهُمْ

"Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang mungkar, dan beriman kepada Allah".³⁸

d. Negara sebagai pelindung martabat manusia

Pemerintah wajib mengembalikan tunawisma ke kehidupan layak secara sosial, ekonomi, dan spiritual.³⁹ Jika Perda tidak menjamin aspek-aspek ini, maka kebijakan tersebut tidak sesuai dengan perspektif Al-Maududi. Spirit memperjuangkan hak-hak dan keberpihakan terhadap kaum *mustadh'afin* pada konteks ini kaum tunawisma sesuai dengan firman Allah SWT yaitu berdasarkan surat Al-Isra Ayat 70, yaitu:

³⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: CV Darus Sunnah, 2002), hlm 108

³⁷ Abul A'la Al-Maududi, *Hukum dan Konstitusi Sistem Politik Islam*, terj. Asep Hikmat (Bandung: Mizan, 1995), hlm. 156.

³⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: CV Darus Sunnah, 2002), hlm 64.

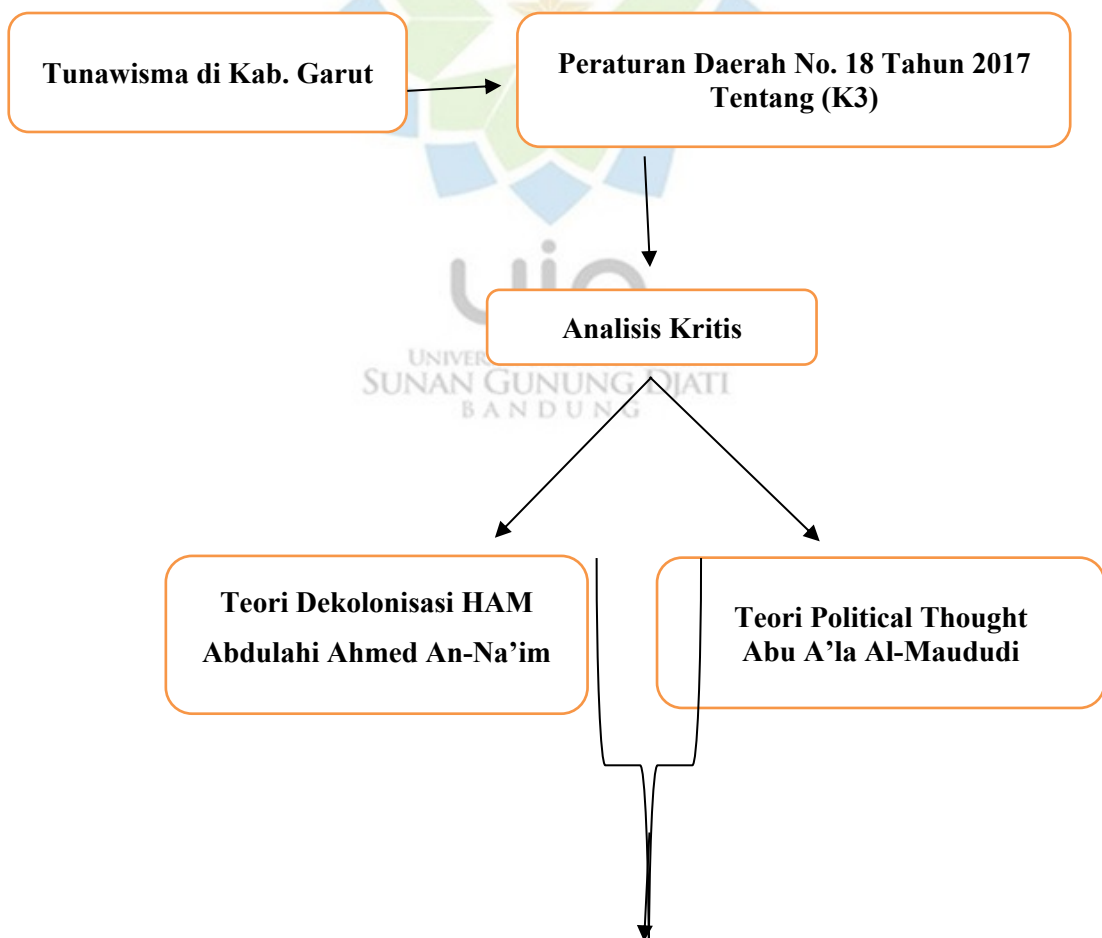
³⁹ Mohd Zakirullah Firdausi, *Political Ideology of Abul A'la Al- Maududi*, (Morrisville, lulu.com, 2014), hlm 81

أَدَمَ وَحَمَلُهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِّنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ ؕ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي

حَاقِّنَا تَفْضِيلًا

"Dan sungguh, Kami telah memuliakan anak cucu Adam, dan Kami angkat mereka di darat dan di laut, dan Kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka di atas banyak makhluk yang Kami ciptakan dengan kelebihan yang sempurna".⁴⁰

Table 1.1
Kerangka Pemikiran



⁴⁰ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: CV Darus Sunnah, 2002), hlm. 289.

Evaluasi Penanganan dan Pembinaan Tunawisma



Rekomendasi Kebijakan yang Humanis

F. Penelitian Terdahulu

Pertama, skripsi yang ditulis oleh Sri Nayif Sumiyati dengan judul “Implementasi Perda Nomor 5 Tahun 2003 Tentang K3 Terhadap Tugas dan Wewenang Satpol PP Dalam Penertiban Gelandangan dan Pengemis Perspektif Wilayah Al- Hisbah” (Studi Kasus Kota Cilegon), Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanudin Banten pada tahun 2024. Hasil skripsi ini menerangkan bahwa bagaimana Implementasi Perda Nomor 5 Tahun 2003 Tentang K3 Terhadap Tugas dan Wewenang Satpol PP Dalam Penertiban Gelandangan dan Pengemis Perspektif Wilayah Al- Hisbah. Skripsi ini mempunyai persamaan dengan penelitian penulis, yakni sama-sama membahas dan mengkaji masalah fenomena sosial tunawisma, gelandangan, dan pengemis serta implemementasi praktis Peraturan Daerah (Perda) tentang Ketertiban, Kebersihan, dan Keindahan dengan menggunakan tinjauan teori atau wacana Islam sebagai pisau analisis. Namun perbedaan yang mendasar dalam pembahasan skripsi ini yaitu fokus pembahasan menilai efektivitas implementasi Peraturan Daerah (Perda) oleh Satpol PP perspektif Wilayatu Al-Hisbah, sedangkan penelitian penulis lebih fokus kepada menyingkap apakah penanganan tunawiswa sesuai dengan prinsip Dekolonisasi Hak Asasi Manusia (Ham) perspektif Abdullahi Ahmed An-Naim dan teori Political Thought Abu A’la Al-Maududi.

Kedua, skripsi yang ditulis oleh Fatimah Sapitry dengan judul “Implementasi Pemidanaan HAM Dalam Perspektif Hukum Islam”, Jurusan Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syari’ah Intitut Agama Islam Negeri Palopo pada tahun 2020. Hasil skripsi ini menerangkan bagaimana implementasi

pidana HAM dalam perspektif hukum Islam. Skripsi ini mempunyai persamaan dengan penelitian penulis yakni, sama-sama menempatkan isu Hak Asasi Manusia (HAM) sebagai fokus kajian dan sama-sama menganalisis regulasi menggunakan pisau analisis perspektif pemikiran Islam. Namun perbedaan yang mendasar dalam pembahasan skripsi ini yaitu fokus menawarkan pemahaman tentang bagaimana sistem hukum Islam menghukum pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) dan bagaimana hukum Islam memandang Hak Asasi Manusia (HAM) dibandingkan sistem hukum positif sedangkan, penelitian penulis lebih fokus kepada meninjau kesesuaian kebijakan penanganan tunawisma dengan nilai Hak Asasi Manusia (HAM) berbasis teori Abdullahi Ahmed An-Naim yang bersifat progresif dan nilai Political Thought berbasis teori Abu A'la Al-Maududi untuk menawarkan kritik terhadap implementasi praktis Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Garut Nomor 18 Tahun 2017 tentang Ketertiban, Kebersihan, dan Keindahan.

Ketiga, skripsi yang ditulis oleh Rembakayasa dengan judul “Konsep Bhineka Tunggal Ika Perspektif Abdullahi Ahmed An-Naim”, pada Jurusan Aqidah dan Filsafat Islam Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta pada tahun 2019. Skripsi ini membahas dan mengkaji bagaimana konsep Bhineka Tunggal Ika Perspektif Abdullahi Ahmed An-Naim. Skripsi ini mempunyai persamaan dengan penelitian penulis, yakni sama-sama menggunakan tokoh Abdullahi Ahmed An-Naim untuk mengkaji konteks sosial dan isu kemanusiaan. Namun perbedaan yang mendasar dalam pembahasan skripsi ini yaitu fokus untuk menggali bagaimana pemikiran Abdullahi Ahmed An-Naim konsep Bhineka Tunggal Ika dan menawarkan reinterpretasi pluralisme dalam konteks sosial di Indonesia, sedangkan penelitian penulis lebih fokus kepada meninjau apakah penanganan tunawisma berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) sesuai dengan prinsip Hak Asasi Manusia (HAM) dan nilai-nilai keadilan menurut dua tokoh serta membandingkan perspektif Abdullahi Ahmed An-Naim dan Abu A'la Al-Maududi terhadap isu sosial dan kemanusiaan.

Keempat, tesis yang ditulis oleh Ahmad Bahrur Rozi dengan judul “Penerapan Syari'ah di Negara Modern (Analisis Ijtihad Pemikiran Abdullahi Ahmed

An-Na'im)" program Pasca Sarjana Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya pada tahun 2015. Hasil tesis ini membedah bagaimana konsep *Ijtihad* dalam pemikiran Abdullahi Ahmed An-Na'im bertransformasi untuk menjawab tantangan negara modern. Penelitian penulis memiliki irisan tematik dengan kajian Ahmad Bahrur Rozi mengenai integrasi syariat dalam negara modern melalui ijtihad Abdullahi Ahmed An-Na'im, namun terdapat distingsi yang tegas pada aspek operasionalisasi teori. Jika Ahmad Bahrur Rozi memfokuskan analisisnya pada metodologi ijtihad dan transformasi teks secara epistemologis, penelitian ini justru menarik pemikiran An-Na'im ke ranah sosiologi hukum dan kebijakan publik di tingkat lokal. Kebaruan penelitian ini terletak pada penggunaan metode komparatif yang menyandingkan teori *Dekolonisasi HAM* An-Na'im dengan *Political Thought* Abu A'la Al-Maududi untuk membedah secara kritis Perda Kabupaten Garut Nomor 18 Tahun 2017. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya berhenti pada diskursus teoritis tentang negara modern, melainkan memberikan kontribusi aplikatif dalam mengevaluasi model penanganan dan pembinaan tunawisma agar selaras dengan martabat kemanusiaan dan keadilan sosial dalam Islam.

Kelima, skripsi tang ditulis oleh Reki Hepana dengan judul "Konstitusi Negara Ideal Menurut Abul A'la Al-Maududi (1903-1979 M)", Jurusan Aqidah Filsafat Islam Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Syarif Kasim Riau pada tahun 2011. Hasil skirpsi ini membedah konsep teoretis mengenai bangunan negara (Teo-Demokrasi), kedaulatan Tuhan, dan sumber hukum tertinggi (Al-Qur'an dan Sunnah) yang harus menjadi konstitusi sebuah negara. Penelitian penulis memiliki kaitan erat dengan kajian mengenai "Konstitusi Negara Ideal Menurut Abul A'la Al-Maududi" dalam hal penggunaan prinsip dasar *Teo-Demokrasi* dan tanggung jawab negara sebagai pemegang mandat syariat untuk menciptakan kesejahteraan dan keadilan. Namun, terdapat perbedaan signifikan dalam hal lokus dan fokus analisis; jika penelitian terdahulu berhenti pada eksplorasi teoretis-ideologis mengenai bangunan konstitusi negara Islam, penelitian penulis melangkah lebih jauh ke ranah praktik legislasi daerah. Orisinalitas penelitian ini terletak pada upaya mengonfrontasi teori politik Al-Maududi dengan teori dekolonisasi HAM Abdullahi

Ahmed An-Na'im untuk mengevaluasi secara kritis Perda Kabupaten Garut Nomor 18 Tahun 2017 tentang K3. Peneliti penulis memposisikan pemikiran Al-Maududi bukan sekadar sebagai konsep negara, melainkan sebagai pisau bedah etis untuk menguji apakah penanganan tunawisma di Garut sudah mencerminkan kewajiban negara dalam melindungi martabat manusia, atau justru terjebak pada pendekatan ketertiban yang opresif.

Tabel 1.2
Penelitian Terdahulu

No.	Peneliti & Tahun	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Sri Nayif Sumiyati (2024)	“Implementasi Perda Nomor 5 Tahun 2003 Tentang K3 Terhadap Tugas dan Wewenang Satpol PP Dalam Penertiban Gelandangan dan Pengemis Perspektif Wilayah Al-Hisbah”	Sama-sama mengkaji fenomena sosial tunawisma, gelandangan, dan pengemis serta implementasi praktis Perda K3 dengan tinjauan wacana Islam.	Fokus Sri Nayif pada efektivitas tugas Satpol PP dalam perspektif <i>Wilayatul Al-Hisbah</i> , sedangkan penulis fokus pada Dekolonisasi HAM perspektif Abdullahi Ahmed An-Naim dan <i>Political Thought</i> Al-Maududi.
2	Fatimah Sapitry (2020)	“Implementasi Pemidanaan HAM Dalam	Sama-sama menjadikan isu Hak Asasi Manusia	Fatimah fokus pada sistem pemidanaan pelanggaran HAM

		Perspektif Hukum Islam”	(HAM) sebagai fokus utama dan menganalisis regulasi menggunakan kacamata hukum Islam.	dalam hukum Islam vs hukum positif, sedangkan penulis fokus pada kritik kebijakan penanganan tunawisma (Perda Garut No. 18/2017) melalui teori progresif An-Naim dan pemikiran politik Al-Maududi.
3.	Rembakayasa (2019)	“Konsep Bhineka Tunggal Ika Perspektif Abdullahi Ahmed An-Naim”	Sama-sama menggunakan pemikiran tokoh Abdullahi Ahmed An-Naim sebagai pisau analisis untuk mengkaji isu sosial dan kemanusiaan.	Rembakayasa fokus pada reinterpretasi pluralisme (Bhineka Tunggal Ika), sedangkan penulis fokus pada kebijakan penanganan tunawisma dengan komparasi pemikiran An-Naim dan Al-Maududi.
4	Ahmad Bahrur Rozi (2015)	“ Penerapan Syari’ah di Negara Modern (Analisis Ijtihad Pemikiran	Memiliki irisan tematik dengan kajian Ahmad Bahrur Rozi mengenai integrasi syariat dalam negara	Terdapat distingsi yang tegas pada aspek operasionalisasi teori. Jika Ahmad Bahrur Rozi memfokuskan

		Abdullahi Ahmed An-Na'im)"	modern melalui ijtihad Abdullahi Ahmed An-Na'im.	analisisnya pada metodologi ijtihad dan transformasi teks secara epistemologis, penelitian penulis justru menarik pemikiran An-Na'im ke ranah sosiologi hukum dan kebijakan publik di tingkat lokal.
5	Reki Hepana (2011)	"Konstitusi Negara Ideal Menurut Abul A'la Al-Maududi (1903-1979 M)"	Memiliki kaitan erat dengan kajian mengenai "Konstitusi Negara Ideal Menurut Abul A'la Al-Maududi" dalam hal penggunaan prinsip dasar <i>Teo-Demokrasi</i> dan tanggung jawab negara sebagai pemegang mandat syariat untuk menciptakan kesejahteraan dan keadilan.	Terdapat perbedaan signifikan dalam hal lokus dan fokus analisis; jika penelitian terdahulu berhenti pada eksplorasi teoretis-ideologis mengenai bangunan konstitusi negara Islam, penelitian penulis melangkah lebih jauh ke ranah praktik legislasi daerah.